

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH :
TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi

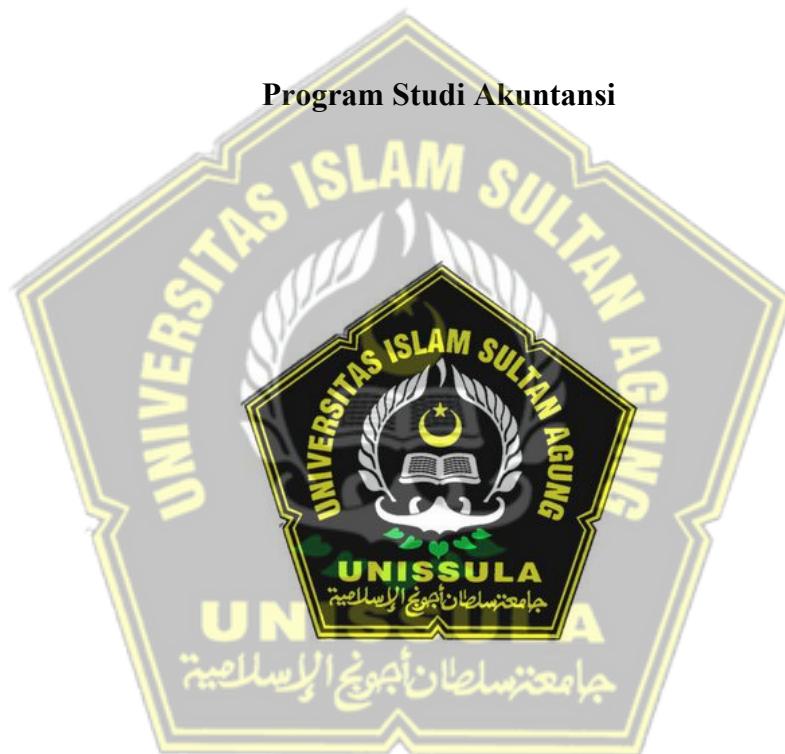


**Disusun Oleh :
Sherly Engga Suryani
NIM : 31402400044**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH :
TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :

Sherly Engga Suryani

NIM : 31402400044

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH : TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL

Disusun Oleh :

Sherly Engga Suryani

NIM : 31402400044

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

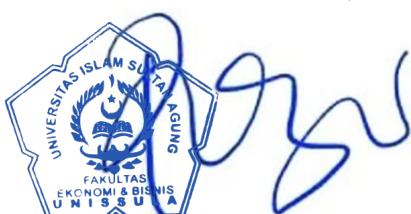
Semarang, 13 Agustus 2025

UNISSULA

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH : TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL

Disusun Oleh :

Sherly Engga Suryani

NIM : 31402400044

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

UNISSULA

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

Dosen Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherly Engga Suryani

NIM : 31402400044

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

“DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH : TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL ”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, Agustus 2025

Yang Menyatakan,


Sherly Engga Suryani
NIM. 31402400044

ABSTRAK

“Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah : Tinjauan Finansial dan Non Finansial”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan. Sehingga variabel penelitian ini terdiri variable indepen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit. Variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022-2024. Sampel penelitian menggunakan sampling jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh informasi data sekunder berupa data LRA, data PDRB, dan data Opini Audit yang diakses melalui situs resmi BPK, BPS, dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif dan analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain variabel independen hanya mempengaruhi variabel dependen sebesar 20,5%. Hal ini mengindikasikan sebesar 79,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selain itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur secara kuantitatif melalui rasio efisiensi tanpa mempertimbangkan kualitas output pelayanan publik yang dihasilkan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the factors that influence the financial performance of local governments, which is explained using agency theory. The independent variables in this study are Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditures, Economic Growth, and Audit Opinions. The dependent variable is the Financial Performance of Local Governments, which is measured using the Efficiency Ratio. The population in this study is the Regency/City in Central Java Province in the 2022-2024 Fiscal Year. The research sample used saturated sampling. The data collection method uses the documentation method to obtain secondary data information in the form of Budget Realization Reports (LRA) data, GRDP data, and Audit Opinion data accessed through the official website and data requests to the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Java Province. Meanwhile, the data analysis technique used is descriptive statistical analysis and data analysis using Multiple Linear Regression with the help of the SPSS 25 program. The results of this study indicate that Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditures have a significant effect on the financial performance of local governments, while economic growth and audit opinions do not have a significant effect on the financial performance of local governments. This study has limitations, including the fact that the independent variable only influences the dependent variable by 20.5%. This indicates that 79.5% is explained by other variables not included in this model. Furthermore, Regional Government Financial Performance, measured quantitatively through efficiency ratios, does not consider the quality of public service output.

Keywords : Regional Original Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditure, Economic Growth, Audit Opinion, Financial Performance of Local Governments

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul **“DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH : TINJAUAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Proposal Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi.
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Kepada keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis.
8. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2024 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi.

Penulis menyadari masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulisan bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang,

Penulis,

Mei 2025

Sherly Engga Suryani

NIM. 31402400044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT.....</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN	12
1.4 TUJUAN PENELITIAN	13
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 LANDASAN TEORI.....	15
2.1.1 Teori Keagenan	15
2.1.2 Teori Otonomi Daerah	18
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	19
2.1.4 Dana Perimbangan	20
2.1.5 Belanja Modal	21
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.7 Opini Audit	23
2.1.8 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	26
2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS	33

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
2.3.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.3.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 35	
2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
2.3.5 Opini Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 38	
2.4 KERANGKA PENELITIAN	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 JENIS PENELITIAN	42
3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	42
3.2.1 Populasi.....	42
3.2.2 Sampel.....	43
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA	43
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	44
3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURAN VARIABEL.....	44
3.5.1 Variabel Dependen (Y)	44
3.5.2 Variabel Independen (X).....	45
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA.....	49
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	49
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.6.3 Model Regresi Linear Berganda	52
3.6.4 Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	53
3.6.5 Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN / RESPONDEN	55
4.2 UJI STATISTIK DESKRIPTIF	56

4.3	ANALISIS DATA	60
4.3.1	Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.3.2	Model Regresi Linear Berganda	66
4.3.3	Hasil Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	69
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis	71
4.4	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	75
4.4.1	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	75
4.4.2	Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	76
4.4.3	Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 78	
4.4.4	Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	79
4.4.5	Opini Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 80	
BAB V	PENUTUP.....	82
5.1	KESIMPULAN	82
5.2	IMPLIKASI	83
5.3	KETERBATASAN PENELITIAN	83
5.4	AGENDA PENELITIAN MENDATANG.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. 2 Tabel Kriteria Opini Audit.....	47
Tabel 2. 3 Variabel Penelitian dan Pengukuran	48
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov.....	60
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	66
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
Tabel 4. 8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	70
Tabel 4. 9 Hasil Uji t	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit terhadap dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tujuan fundamental untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, urusan pemerintahan dijalankan melalui tiga prinsip utama yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Konsep desentralisasi merupakan transfer urusan pemerintahan dari level pusat kepada daerah otonom yang didasarkan pada Asas Otonomi. Asas ini menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian melahirkan konsep Otonomi Daerah. Melalui Otonomi Daerah, setiap daerah otonom memperoleh hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah berpijak pada dua prinsip esensial meliputi otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata tercermin dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada secara faktual dan memiliki potensi berkembang sesuai karakteristik daerah. Sementara prinsip bertanggung jawab menekankan bahwa pelaksanaan otonomi harus selaras dengan tujuan pemberian otonomi itu sendiri, yakni pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pencapaian tujuan nasional (Maulina et al., 2021).

Berdasarkan konteks teori keagenan (agency theory), hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat dipandang sebagai hubungan keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sementara pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal yang mendelagasikan wewenang kepada pemerintah daerah menurut Jensen & Meckling (1976). Implementasi kebijakan otonomi daerah yang diterapkan, membawa konsekuensi fundamental terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik (Maulina et al., 2021).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah didukung oleh suatu sistem yang sangat terpadu dan terstruktur serta dibangun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yaitu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen yang digunakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Ketika suatu daerah mampu mengelola keuangannya secara efektif, hal ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong kemajuan dan perkembangan

daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan tercermin dari efektivitas pengelolaan keuangannya.

Aspek utama pengelolaan keuangan daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada pengeluaran dan pola pendapatan. Misalnya, belanja merupakan aspek penting bagi suatu masyarakat agar mereka dapat mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Sejalan dengan itu, aspek pendapatan menjadi kunci dalam fungsi pengorganisasian dan pengelolaannya yang dapat berasal dari daerah yang berpotensi subur. Data pengeluaran masa lalu suatu daerah tertentu merupakan faktor penentu utama anggaran keuangan daerah. Data spesifik pengeluaran masa lalu meliputi tetapi tidak terbatas pada pengeluaran modal, barang dan jasa serta beberapa pengeluaran lain-lain suatu daerah (Andjarwati et al., 2021). Keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah, dan sebagainya. Namun, keuangan daerah yang baik mustahil dicapai apabila pengelolaan keuangan daerahnya tidak memadai. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Kinerja keuangan biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Kinerja keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam menilai akuntabilitas agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat). Mahmudi

(2007) menegaskan bahwa analisis kinerja keuangan daerah penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam konteks teori keagenan, pengukuran kinerja keuangan berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendanaan dan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan anggaran pendapatan daerah. Apabila pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintah pusat dengan mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, hal ini dapat berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Andjarwati et al., 2021). Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah (Antari & Sedana, 2018).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Antari & Sedana, 2018). Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola secara baik dan benar, maka pengendalian keuangan daerah tersebut, baik dalam aspek pendapatan maupun belanja, akan berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang optimal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk diteliti secara mendalam. Penelitian mengenai kinerja keuangan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai pihak pengelola, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya yang

memerlukan informasi akurat dan transparan terkait kondisi keuangan daerah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah masih menunjukkan kontribusi PAD yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Banyak kabupaten/kota mengandalkan pendapatan dari transfer pusat (dana perimbangan) dibandingkan upaya menggali sumber pendapatan asli. Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah masih rendah. Dalam konteks teori otonomi daerah, seharusnya otonomi fiskal mendorong daerah lebih kreatif meningkatkan PAD untuk membiayai belanja publik. Kecilnya PAD ini berpotensi membatasi fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berbasis potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah tersebut (Pangestu, 2023). PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Namun, terdapat temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Andirfa et al. (2016) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya,

penelitian Darwanis & Saputra (2014) dan Noeng et al. (2023) mengungkapkan hasil berbeda dimana PAD tidak memiliki pengaruh signifikan seperti halnya penelitian oleh Aryasandi & Akbar (2024) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2022.

Dana perimbangan masih menjadi komponen utama penerimaan daerah di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ketergantungan ini menandakan bahwa keberlanjutan fiskal daerah masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional. Secara teori keagenan, ketergantungan ini berpotensi menciptakan *moral hazard*, di mana pemerintah daerah kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan karena merasa akan selalu mendapatkan transfer dana dari pusat. Selain itu, tingginya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah mengindikasikan bahwa daerah belum sepenuhnya berdaya dalam pengelolaan sumber daya lokalnya.

Dana Perimbangan merupakan indikator Pendapatan Daerah yang dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi PAD, maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu daerah mampu membiayai pembiayaan di daerahnya. Sebaliknya, semakin tinggi realisasi Dana Perimbangan di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan daerah tersebut akan tergantung pada pemerintah pusat (Andjarwati et al., 2021). Dana perimbangan sebagai komponen pendapatan daerah yang berasal dari pusat juga menunjukkan hasil penelitian yang beragam. (Sudarsana & Rahardjo, 2013) menemukan pengaruh positif dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Bertentangan dengan hal tersebut, penelitian (Retnowati, 2016) justru menunjukkan pengaruh negatif, dimana semakin tinggi dana perimbangan justru menurunkan kinerja keuangan daerah. Selain itu penelitian oleh Aryasandi & Akbar (2024) juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, tetapi juga oleh alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2016) mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika anggaran belanja modal dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, hal tersebut dapat menghasilkan berbagai manfaat yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya memperkuat posisi keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (Pastiwi & Aji, 2020) yang tidak mendukung kesimpulan tersebut.

Data belanja modal 2022–2024 memperlihatkan adanya ketimpangan yang cukup besar antar daerah, dengan realisasi belanja modal tahun 2024 berkisar dari Rp 175 miliar hingga Rp 581 miliar. Realisasi ini belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan PAD yang signifikan di banyak daerah. Selain itu, disparitas antara kota besar seperti Semarang dengan daerah tertinggal seperti Banjarnegara atau Purbalingga semakin memperjelas ketimpangan pengelolaan keuangan daerah. Kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Magelang memiliki nilai belanja modal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten di daerah pantai utara atau selatan Jawa Tengah. Padahal, belanja modal merupakan investasi pemerintah

daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas layanan publik. Rendahnya belanja modal di beberapa daerah menandakan potensi permasalahan dalam efektivitas penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya kinerja keuangan daerah tersebut.

Ketiga fenomena di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh struktur pendapatan dan pola belanja tersebut. Pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada dana perimbangan dan minim inovasi PAD berisiko memiliki kinerja keuangan yang stagnan.

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara yang lain stagnan atau bahkan menurun. Pertumbuhan ekonomi daerah, ukuran wilayah, dan pendapatan asli daerah secara simultan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan kinerja keuangan pemerintah dapat dicapai melalui dorongan pertumbuhan ekonomi, besaran wilayah administratif, serta kapasitas PAD. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah (Bahrul Ilmi, 2023). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah oleh Aziz & Kusumawati (2024) dan Insani et al. (2023) serta

Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan yang optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa opini audit tidak secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sudarsana & Rahardjo (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian oleh Safitri et al. (2024) yang menghasilkan Kesimpulan bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sundari & Pramesti (2025) menyatakan bahwa opini audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan opini audit tidak mencerminkan kinerja keuangan yang baik.

Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam aspek kinerja keuangan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan lebih dari 80% pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, capaian opini tersebut tidak serta merta mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih tinggi,

memperlihatkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Jawa Tengah menunjukkan variasi antar daerah, hal ini juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dalam konteks teori keagenan, kondisi ini menggambarkan potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, terutama terkait dengan pengelolaan dana publik. Otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan nyatanya masih menghadapi tantangan struktural dan kapasitas fiskal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor finansial seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, serta faktor non-finansial seperti pertumbuhan ekonomi dan opini audit, untuk memahami determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti. Kesenjangan kinerja keuangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah diuraikan, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan menggunakan data terbaru yaitu Tahun Anggaran 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, yang dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dan analisis terhadap kinerja keuangan daerah dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi para pengelola keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui informasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan fenomena yang ada, masih terdapat kesenjangan kinerja keuangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi tantangan, dimana menurut data BPS Jawa Tengah menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam capaian PAD dan pengelolaan keuangan antar kabupaten/kota. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah masih menunjukkan ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dibandingkan dengan PAD yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota juga menunjukkan variasi yang signifikan. Selain itu, meskipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun capaian opini tersebut tidak serta merta mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan daerah yang dipengaruhi oleh faktor finansial seperti Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal serta faktor non-finansial seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya. Begitu pula untuk hasil penelitian terdahulu atas pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu hasil yang berbeda-beda juga ditunjukkan oleh penelitian yang menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan fenomena yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 – 2024.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akademik, khususnya dalam pemahaman tentang

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 – 2024. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan memberikan perspektif baru dalam memandang Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan tinjauan dari segi Finansial dan Non Finansial yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau landasan dan referensi baru bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang keuangan daerah.

2. Manfaat bagi Praktisi
 - a. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menambah pengalaman, wawasan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi.
 - b. Sebagai bahan masukan pengelola keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui informasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan yang tepat.
 - c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemberi mandat) dan *agent* (pelaksana mandat). Dalam hubungan tersebut, pemberi mandat memberikan kuasa kepada pelaksana untuk membuat keputusan atas namanya. Namun, seringkali muncul konflik kepentingan dan ketimpangan informasi yang dikenal sebagai masalah keagenan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, publik berperan sebagai pemberi mandat, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana mandat. Publik berharap pemerintah dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan bersama. Akan tetapi, ketimpangan informasi seringkali menghambat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ketimpangan informasi terjadi saat pelaksana mandat memiliki akses informasi yang lebih luas dibanding pemberi mandat. Kondisi ini dapat mendorong perilaku oportunistik yang bertentangan dengan kepentingan pemberi mandat. Dalam konteks keuangan daerah, ketimpangan informasi dapat muncul ketika pemerintah tidak transparan dalam pelaporan keuangan atau menggunakan dana publik untuk keperluan pribadi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan eksternal dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan parameter penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Dari sudut pandang teori keagenan, PAD menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan. Publik mengharapkan PAD dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Riset menunjukkan bahwa peningkatan PAD berdampak positif pada kinerja keuangan karena memberikan kemandirian finansial yang lebih besar. Dana perimbangan adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung otonomi. Dalam perspektif teori keagenan, dana ini menjadi instrumen bagi pemberi mandat untuk memastikan pelaksana mandat memiliki sumber daya yang memadai. Namun, ketergantungan berlebih pada dana perimbangan dapat memunculkan risiko moral, di mana pemerintah daerah kurang terdorong untuk meningkatkan PAD atau efisiensi penganggaran. Belanja modal merupakan investasi pemerintah dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur. Dalam teori keagenan, belanja modal dipandang sebagai sarana bagi pelaksana mandat untuk memenuhi kebutuhan pemberi mandat. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, penyimpangan atau pemborosan anggaran dapat merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang tepat, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang efektif. Ini mencerminkan bahwa agen (pemerintah daerah) menjalankan perannya secara baik dalam memenuhi harapan prinsipal (masyarakat). Semakin baik kinerja agen dalam

mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi, maka kinerja keuangan daerah pun akan meningkat, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal daerah. Opini audit BPK merupakan bentuk evaluasi independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang baik (seperti Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) menunjukkan bahwa agen telah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi. Dalam kerangka teori keagenan, opini audit berfungsi sebagai mekanisme monitoring (pengawasan) terhadap agen untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dan moral hazard. Ketika agen mendapatkan opini audit yang baik, hal ini menjadi sinyal positif bahwa mereka telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Teori keagenan tidak hanya menyediakan kerangka pemahaman untuk menganalisis hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memberikan landasan penting untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama dalam meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketika kedua prinsip ini diterapkan secara konsisten, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dalam mengelola sumber daya publik, sementara masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah, dan

pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.2 Teori Otonomi Daerah

Secara etimologis dan historis, konsep otonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "autos" (sendiri) dan "nomos" (aturan atau hukum). Otonomi merupakan konsep pemerintahan sendiri yang berkembang menjadi kemampuan membuat aturan sendiri. Otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai tatanan administratif, tetapi juga sebagai tatanan ketatanegaraan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah merupakan manifestasi dari prinsip konstitusional yang memberikan legitimasi bagi daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu prinsip nyata, prinsip bertanggung jawab, dan prinsip dinamis. Prinsip-prinsip tersebut harus diselaraskan dengan kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Penerapan prinsip-prinsip ini telah mengubah paradigma pengelolaan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengembangkan potensinya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber

dayanya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian keuangan daerah. Apridiyanti (2019) menemukan bahwa peningkatan PAD memiliki korelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, sebagai komplementer PAD, berperan penting dalam menjamin pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga optimalisasi pengelolaan dana perimbangan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Belanja modal memegang peranan strategis dalam implementasi otonomi daerah dan peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut Tampubolon (2019), alokasi belanja modal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik melalui belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD di sebagian besar daerah, diikuti oleh retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang cukup potensial. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup berbagai bentuk pemanfaatan aset daerah yang dapat menghasilkan pendapatan. Sementara itu, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi berbagai jenis penerimaan

yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya namun secara legal diakui sebagai sumber PAD.

PAD merupakan komponen fundamental dalam struktur keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber daya ekonomi di wilayahnya. PAD menjadi salah satu pilar utama kemandirian fiskal daerah dalam era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Tingkat PAD yang semakin tinggi menandakan semakin menurunnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang berakibat pada semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022).

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan instrumen fiskal penting dalam sistem desentralisasi keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, dana perimbangan menjadi sumber pendanaan yang vital bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publiknya. Mekanisme transfer dana perimbangan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat daerah dan antar pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Hal tersebut dikarenakan potensi pendapatan setiap daerah berbeda-beda, sehingga untuk mewujudkan perimbangan keuangan diperlukan dana perimbangan (Maulina et al., 2021) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al. (2022) dan Pastiwi

& Aji (2020) mengungkapkan adanya pengaruh positif antara dana perimbahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Efektivitas pengelolaan dana perimbangan memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dana perimbangan secara transparan dan akuntabel. Pemanfaatan dana perimbangan harus dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan komponen penting dalam struktur belanja pemerintah daerah yang memiliki karakteristik khusus dalam penggunaannya. Berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS), belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan atau penambahan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, demikian pula definisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009. Pengeluaran ini harus melebihi batas minimum kapitalisasi aktiva tetap atau aktiva lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aset yang diperoleh melalui belanja modal ini diperuntukkan bagi operasional kegiatan sehari-hari unit kerja dan bukan untuk tujuan diperjualbelikan. Karakteristik utama belanja modal terletak pada sifat dan durasi manfaat yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut. Setiap aset yang

diperoleh melalui belanja modal harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu tahun anggaran. Nilai ekonomis yang dihasilkan dari belanja modal harus dapat diukur secara jelas dan teridentifikasi. Penggunaan belanja modal harus berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

Dalam implementasinya, belanja modal mencakup berbagai jenis pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud. Komponen belanja modal meliputi pengadaan tanah sebagai aset strategis pemerintah daerah. Belanja peralatan dan mesin ditujukan untuk mendukung operasional pemerintahan sehari-hari. Pembangunan gedung dan bangunan serta infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan juga menjadi bagian dari alokasi belanja modal. Pengelolaan belanja modal membutuhkan sistem pengendalian dan monitoring yang ketat untuk memastikan ketepatan penggunaannya. Setiap aset yang diperoleh melalui belanja modal harus dicatat dan dikelola dalam sistem inventarisasi aset daerah. Pemeliharaan aset hasil belanja modal harus direncanakan dengan baik untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya. Adanya belanja modal yang tinggi diharapkan akan mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang semakin tinggi. Dalam teori keagenan, diharapkan belanja modal dapat dikelola dengan baik supaya memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, adanya infrastruktur yang mumpuni dapat mendorong efisiensi di segala sektor (Dwi Sundari & Pramesti, 2025). Oleh karena itu, semakin tingginya belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Lathifa Hasna, 2019).

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi salah satunya didefinisikan sebagai perbaikan keadaan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu secara stabil (Yasin, 2020). Salah satu hal yang dapat menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto Regional. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi tolak ukur perkembangan daerah tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian oleh Aryasandi & Akbar (2024). menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan pula sebagai peningkatan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa oleh suatu daerah (Heryanti et al., 2019). Berbagai penelitian dalam studi literatur oleh Bahrul Ilmi (2023) juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan variabel lain secara bersama memiliki dampak positif terhadap kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Opini Audit

Opini audit merupakan hasil dari proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai tingkat kewajaran informasi yang disajikan oleh entitas pemerintah. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), opini audit diartikan sebagai pernyataan profesional auditor independen mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam konteks pemerintah daerah, opini yang

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, opini audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara langsung melalui peningkatan kualitas pengelolaan anggaran maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila opini audit mendapatkan hasil yang maksimal, pandangan dan kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Kepercayaan masyarakat dapat mendorong peningkatan pendapatan dan pendapatan daerah (Dwi Sundari & Pramesti, 2025).

2.1.8 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam satu periode anggaran. Kinerja ini mencerminkan hasil dari penggunaan anggaran daerah yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan menjadi elemen utama untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik (Kopong, 2019)

Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi merupakan prinsip dasar dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Efisiensi merujuk pada kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penggunaan anggaran. Sementara itu, prinsip ekonomi mengacu pada penggunaan sumber daya dengan biaya terendah tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertanggung jawab (Rachmawati & Handayani, 2023)

Laporan keuangan pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam menilai kinerja keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan ini harus mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan tersebut memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Informasi ini tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam evaluasi internal tetapi juga memberikan transparansi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana publik.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap penerimaan dan belanja, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik serta memperkuat kapasitas fiskal mereka. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga mendorong Upaya peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Insani et al., 2023).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1	Insani et al. (2023)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, Dana Perimbangan berpengaruh negatif, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2	Thalib & Ekaningtias (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,	Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

		Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regressi Linear Berganda	berpengaruh negatif, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3	Noeng et al. (2023)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Regressi Linear Berganda	Dana Perimbangan berpengaruh positif, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4	Sudarsana & Rahardjo (2013)	Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan dengan Pusat, Belanja Modal, Temuan Audit BPK, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota se Indonesia Regressi logistik ordinal	Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat, dan Belanja Modal tidak berpengaruh, sedangkan temuan audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
5	Dwi Sundari & Pramesti (2025)	Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Opini Audit, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Regressi Data Panel (eviews)	Ukuran Pemerintah Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif, sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

6	Safitri et al. (2024)	Opini Audit, Temuan Audit, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Regressi Linear Berganda	Opini Audit dan Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
7	Aryasandi & Akbar (2024)	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Regressi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif, Pendapatan Transfer tidak berpengaruh, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
8	Antari & Sedana (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota di Provinsi Bali Regressi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
9	Putri & Yuniarta (2023)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota di Provinsi Bali Regressi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

10	Digidwiseiso et al. (2022)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Indonesia Regresi Berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
11	Heryanti et al. (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, Dana Perimbangan berpengaruh negatif, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
12	Maulina et al. (2021)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Regresi Linear Berganda (STATA)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

				Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
13	Andirfa et al. (2016)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Aceh Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sedangkan secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif, Dana Perimbangan berpengaruh negatif, dan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
14	Bahrul Ilmi (2023)	Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Literatur Review	Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersamaan berdampak positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
15	Aziz & Kusumawati (2024)	Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah,	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh,

		Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, Temuan Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda	sedangkan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
16	Pangestu (2023)	Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh, Dana Perimbangan berpengaruh negatif, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
17	Pradana & Handayani (2023)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kinerja Keuangan	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Regrési Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, DAU tidak berpengaruh, sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
18	Atmoko & Khairudin (2022)	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap

			Regresi Linear Berganda	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
19	Pastiwi & Aji (2020)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, Dana Perimbangan berpengaruh negatif, sedangkan Dana Keistimewaan dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
20	Wahyudin & Hastuti (2020)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ketiga variabel independen berpengaruh positif signifikan secara simultan

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan elemen kunci dalam sistem keuangan pemerintah daerah. PAD dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dikenakan kepada individu atau badan usaha, baik yang bersifat publik maupun swasta, sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Julitawati & Darwanis (2012). Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sah berdasarkan undang-undang. Jumlah PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan. Tingginya PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan kata lain, semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan signifikan antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Atmoko & Khairudin (2022) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya persentase kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi jika PAD meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Pradana & Handayani (2023) yang menemukan hasil serupa di mana PAD berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian lain oleh Putri & Yuniarta (2023), Digdowiseiso et al. (2022), Pastiwi & Aji (2020), Heryanti et al. (2019), Wahyudin & Hastuti (2020), Maulina et al. (2021) menyimpulkan hasil yang sama. Berdasarkan berbagai bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan PAD berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendanaan pemerintah daerah yang berasal dari transfer anggaran pemerintah pusat. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika belanja daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran. Dalam konteks ini untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam rekening pendapatan daerah, sehingga meningkatkan total pendapatan yang tersedia. Meskipun dana perimbangan dapat meningkatkan total pendapatan pemerintah daerah, ketergantungan pada dana ini dapat berdampak

negatif pada kinerja keuangan. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah, semakin tinggi pula ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini berpotensi menurunkan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokalnya.

Penelitian oleh Noeng et al. (2023), Insani et al. (2023), Wahyudin & Hastuti (2020), Padang & Padang (2023), Maulina et al. (2021), Andjarwati et al. (2021) menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun dana perimbangan dapat membantu memenuhi kebutuhan belanja daerah, ketergantungan yang tinggi pada dana tersebut dapat mengurangi motivasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dampak jangka panjangnya dapat merugikan kemandirian finansial daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mencari keseimbangan antara memanfaatkan dana perimbangan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_2 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian atau pembangunan aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat lebih dari satu

periode. Dengan adanya belanja modal yang signifikan, pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Digidwiseiso et al. (2022) yang menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pentingnya belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan juga didukung oleh penelitian lain, seperti yang dilakukan di Kota Kendari. Penelitian oleh (Abdullah et al., 2022) menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, di mana peningkatan 1% dalam belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,613%. Namun, tidak semua penelitian sepakat mengenai dampak positif belanja modal. Sebuah studi di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, belanja modal tidak memberikan dampak signifikan (Atmoko & Khairudin, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penelitian oleh Dwi Sundari & Pramesti (2025), Lathifa Hasna (2019), Ningrum et al. (2024), Digidwiseiso et al. (2022), Andirfa et al. (2016), Ratnasari & Meirini (2022) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_3 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi yang terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan ini secara langsung dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui ekspansi basis pajak, pertumbuhan investasi, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara optimal demi memenuhi amanah dan kepentingan publik sebagai prinsipal. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mampu menerapkan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menekan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta memperbesar kemampuan pembiayaan belanja publik secara mandiri. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Berdasarkan temuan-temuan empiris sebelumnya oleh Heryanti et al. (2019) dan Bahrul Ilmi (2023) menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, tingkat pengaruh tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada kualitas institusi dan tata kelola keuangan di masing-masing daerah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₄ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Opini Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini seperti Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencerminkan transparansi serta bebas dari kekeliruan yang signifikan. Dalam konteks teori keagenan, opini audit berperan sebagai alat pengawasan untuk meminimalkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah selaku agen dan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat (prinsipal). Ketika pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini yang baik, hal ini mengindikasikan adanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan mengindikasikan kinerja keuangan daerah. Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Az Zahrah et al. (2024), ditemukan adanya kecenderungan pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik opini yang diperoleh, semakin besar pula kemungkinan bahwa anggaran dikelola secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut serupa dengan simpulan oleh Safitri et al. (2024) yaitu opini audit yang baik meningkatkan kinerja pemerintah atau dapat dikatakan ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran. Penelitian sejenis oleh Sudarsana & Rahardjo (2013) berkaitan dengan efek temuan audit BPK terhadap skor kinerja menunjukkan adanya pengaruh positif. Dengan merujuk pada teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₅ : Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (masyarakat) sebagai pemberi mandat dan agent (pemerintah daerah) sebagai pelaksana mandat. Dalam konteks keuangan daerah, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat mengelola sumber daya secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah daerah dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat melalui pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang transparan dan akuntabel. Ketiga variabel tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kinerja keuangan daerah dari segi finansial. Selain itu, terdapat aspek non finansial yang dapat dikaji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Aspek non finansial tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi dan opini audit.

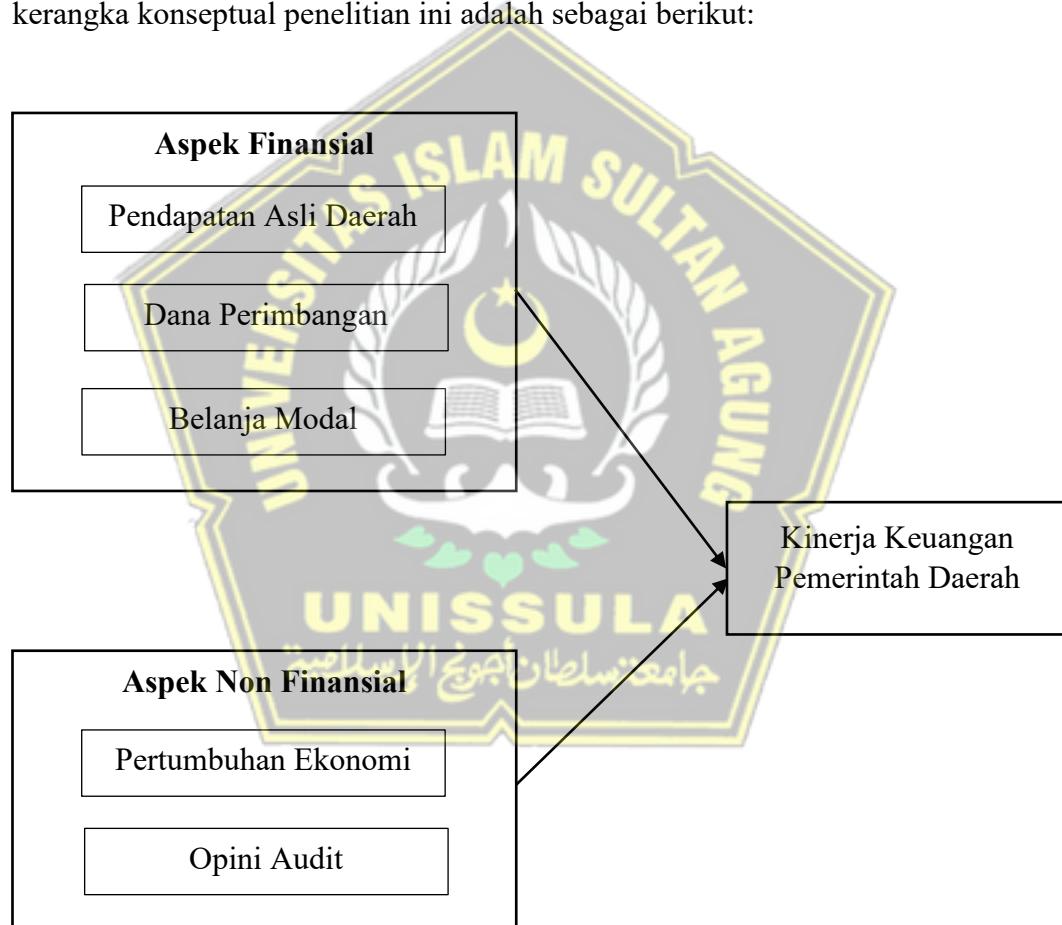
Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan. Tingginya PAD menunjukkan kemandirian finansial yang lebih besar, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dalam perspektif teori keagenan, pengelolaan PAD yang baik menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi harapan masyarakat. Dana Perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam teori keagenan, Dana Perimbangan

berfungsi sebagai instrumen kontrol dari principal kepada agent untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun, ketergantungan berlebih pada Dana Perimbangan dapat memunculkan risiko moral, di mana pemerintah daerah kurang terdorong untuk meningkatkan PAD atau efisiensi anggaran. Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam aset tetap seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Pengalokasian belanja modal yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam teori keagenan, belanja modal yang dikelola dengan baik menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen pada pembangunan jangka panjang yang berdampak positif bagi masyarakat. Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk mencapai tujuan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal menjadi elemen penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika aktivitas produksi dan konsumsi yang dapat memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah, investasi, serta daya beli masyarakat. Dari perspektif teori keagenan, hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal untuk kepentingan publik. Di sisi lain, opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini audit yang baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian, menunjukkan bahwa laporan keuangan telah dikelola secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Secara

keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan opini audit yang positif saling melengkapi dalam memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya fiskal tambahan dan mendorong kemandirian pendanaan, sedangkan opini audit yang baik memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan kajian pustaka dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Opini Audit terhadap dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mencari hubungan antar variabel. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini tepat digunakan karena penelitian ini mengukur pengaruh berbagai variabel aspek finansial (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) dan non finansial (Pertumbuhan ekonomi dan Opini Audit) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang merupakan variabel terukur dan kuantitatif.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi perhatian untuk diteliti. Definisi populasi menurut Sugiyono (2022) yaitu keseluruhan wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan periode waktu yang diteliti adalah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh, dimana menurut Sugiyono (2022) sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2022) data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan didapatkan melalui pihak lain atau melalui dokumen yang sudah tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diakses BPKAD Provinsi Jawa Tengah, data pertumbuhan ekonomi yang diakses dari website resmi BPS, dan data Opini Audit LKPD yang diakses dari website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), metode dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber seperti buku, arsip, dokumen, angka, gambar, serta format yang terdapat dalam laporan atau keterangan lain yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian. Data pada penelitian ini diperoleh dengan mengakses website resmi BPS, website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan mengajukan permintaan data LRA pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURAN

VARIABEL

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel independennya (X) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit.

3.5.1 Variabel Dependend (Y)

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan ukuran efisiensi. Kinerja merupakan gambaran pencapaian suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau

realisasi belanja dan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasionya maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai hasil yang maksimal (output) dengan menggunakan biaya (input) yang serendah rendahnya atau biaya yang diperoleh seminimal mungkin dari hasil yang diinginkan. Apabila kinerja keuangan di atas 100% maka dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% kurang efisien, 80% - 90% cukup efisien, 60% - 80% efisien, dan di bawah 60% sangat efisien. Alokasi biaya tersebut ditransformasikan menjadi rasio efisiensi Thalib & Ekaningtias (2019), yaitu perhitungan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5.2 Variabel Independen (X)

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut di daerah untuk digunakan

sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah guna meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud. Belanja modal diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal Aset Tetap Lainnya + Belanja Modal Aset Lainnya.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kondisi ekonomi suatu wilayah secara stabil dari waktu ke waktu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto Regional. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus dari yang digunakan pada penelitian oleh Insani et al. (2023) sebagai berikut:

$$\Delta PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta PDRB_t$ = Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB pada tahun $t - 1$ (tahun sebelumnya)

5. Opini Audit

Opini audit dalam konteks pemerintahan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat beberapa kriteria opini audit yang dapat dikategorikan berdasarkan tingkatan seperti yang digunakan dalam penelitian oleh Insani et al. (2023) sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Kriteria Opini Audit

Kriteria	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan ringkasan variabel penelitian dan pengukuran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Variabel Penelitian dan Pengukuran

No	Nama Variabel	Pengukuran	Referensi
1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Thalib & Ekaningtias (2019)
2.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
3.	Dana Perimbangan	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
4.	Belanja Modal	Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal Aset Tetap Lainnya + Belanja Modal Aset Lainnya	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
5.	Pertumbuhan Ekonomi	$\Delta PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: $\Delta PDRB_t$ = Laju Pertumbuhan Ekonomi $PDRB_t$ = PDRB pada tahun t $PDRB_{t-1}$ = PDRB pada tahun t - 1 (tahun sebelumnya)	Insani et al. (2023)
6.	Opini Audit	Wajar Tanpa Pengecualian = 5 Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas = 4	Insani et al. (2023)

		Wajar Dengan Pengecualian = 3 Tidak Wajar = 2 Tidak Menyatakan Pendapat = 1	
--	--	---	--

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis. Peneliti menggunakan data dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS 25 melalui tahapan tersebut.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang berhubungan dengan nilai rata-rata (mean), nilai simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Uji statistik deskriptif dilakukan sebelum pengujian model dan hipotesis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum Sugiyono (2022). Data dianalisis berdasarkan nilai maksimal, minimal, rata-rata, median, serta standar deviasi suatu variabel (Sugiyono 2022).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji hipotesis dalam analisis regresi berganda, diperlukan uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan menguji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka hasil regresi

akan bersifat Best Linear Unbiased Estimator, yang berarti memiliki varians minimum, hubungan linier, serta estimasi yang tidak bias (Ghozali, 2018).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu (residual) pada model regresi memiliki distribusi normal sebagaimana disyaratkan dalam analisis regresi klasik (Ghozali, 2018).

Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, nilai residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, nilai residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

Multikolinearitas diuji menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance dengan kriteria:

- c. Jika tolerance $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 , terjadi multikolinearitas.
- d. Jika tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau ketidakteraturan pola residual, khususnya apabila data

tidak memenuhi asumsi normalitas. Run test digunakan untuk menguji keberacakan (*randomness*) dari data residual dalam model regresi dengan menghitung jumlah run, yaitu pola perubahan tanda positif dan negatif secara berurutan. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka residual dinyatakan tidak bersifat acak, yang berarti terdapat masalah autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka residual dinyatakan bersifat acak, yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa terjadi ketidaksamaan varians dari residual, sedangkan jika varians residual bersifat tetap maka disebut homoskedastisitas. Uji Spearman dilakukan dengan melihat korelasi antara nilai prediksi (nilai terstandarisasi) dan residual. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) $> 0,05$, menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas atau residual bersifat homoskedastisitas.

b. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) < 0,05, menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Model Regresi linear berganda digunakan untuk mengestimasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018).

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Perimbangan

X_3 : Belanja Modal

X_4 : Pertumbuhan Ekonomi

X_5 : Opini Audit

β_0 : Intersep/konstanta regresi

β_1 : Slope X_1

β_2 : Slope X_2

β_3 : Slope X_3

β_4 : Slope X_4

β_5 : Slope X_5

ε : Error atau residual model

3.6.4 Uji *Goodness of Fit Model*

Keakuratan model dalam memprediksi nilai sebenarnya diukur melalui *Goodness of Fit Model* (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan melihat koefisien determinasi (R^2) dan uji F. Secara statistik, paling tidak *Goodness of Fit* dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik dianggap signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan Adjusted R^2 , dengan ketentuan:

- a. Semakin mendekati 1, model semakin baik dalam menjelaskan hubungan variabel.
- b. Semakin mendekati 0, model semakin lemah dalam menjelaskan variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

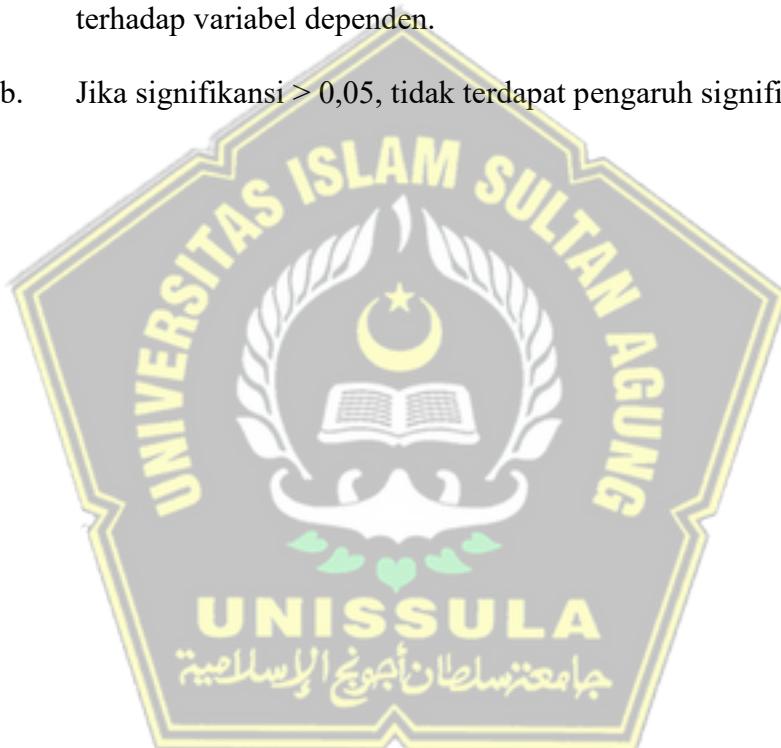
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian:

- a. Jika signifikansi $\leq 0,05$, terdapat pengaruh signifikan.
- b. Jika signifikansi $> 0,05$, tidak terdapat pengaruh signifikan.

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dalam analisis regresi untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian:

- a. Jika signifikansi $\leq 0,05$, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $> 0,05$, tidak terdapat pengaruh signifikan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN / RESPONDEN

Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Jawa Tengah terletak antara antara $5^{\circ}40$ dan $8^{\circ}30$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30$ dan $111^{\circ}30$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa) berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 3,25 juta hektar yang mencakup kurang lebih 25,04 persen dari total luas Pulau Jawa dan sekitar 1,70 persen dari seluruh wilayah Indonesia dan menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar serta tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki otonomi daerah dalam mengelola keuangan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Struktur pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Setiap kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Keberagaman karakteristik antar daerah ini menjadi poin penting untuk dapat memahami kondisi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Statistik ini menyajikan informasi dasar seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam model penelitian. Melalui analisis deskriptif dapat diketahui bentuk sebaran data, adanya outlier, serta skala besar-kecilnya nilai antar variabel. Hasil dari statistik deskriptif menjadi dasar awal dalam mengevaluasi apakah data sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian inferensial. Tabel berikut menyajikan hasil uji statistik deskriptif sebelum dilakukan proses penghapusan data outlier.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	105	240.959.87 8.632	2.885.774.30 6.352	510.375.439. 170	411.584.37 8.827
Dana Perimbangan (Rp)	105	283.486.20 2.715	2.319.472.15 2.668	1.409.470.53 0.555	406.129.74 1.914
Belanja Modal (Rp)	105	75.192.210. 131	1.103.981.68 0.801	305.167.398. 542	170.320.24 7.351
Pertumbuhan Ekonomi (%)	105	2.19%	6.33%	5.11%	0.79%
Opini Audit dari BPK (1-5)	105	3	5	4.93	.286
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	105	.960	1.103	1.019	.030
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dalam satuan miliar rupiah, memiliki nilai minimum sebesar Rp173,98 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp2.885,33 miliar. Rata-rata PAD yang diperoleh adalah sebesar Rp514,5616 miliar, dengan standar deviasi sebesar Rp420,56888 miliar. Nilai rata-rata yang jauh lebih rendah dari nilai maksimum serta tingginya standar deviasi menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah dalam kemampuan menghasilkan PAD. Hal ini dapat mencerminkan perbedaan potensi ekonomi lokal serta efektivitas pengelolaan pendapatan asli oleh masing-masing pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan juga diukur dalam satuan miliar rupiah, menunjukkan nilai minimum sebesar Rp542,58 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp2.660,61 miliar. Rata-rata dana perimbangan adalah sebesar Rp1.668,3756 miliar, dengan standar deviasi sebesar Rp486,58533 miliar. Besarnya nilai standar deviasi menunjukkan adanya variasi distribusi dana perimbangan antar daerah yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbeda-beda, tergantung pada karakteristik fiskal, kebutuhan pembangunan, dan kapasitas daerah masing-masing.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yang digunakan oleh pemerintah daerah juga menunjukkan variasi yang cukup besar. Nilai minimum tercatat sebesar Rp75,19 miliar, sedangkan nilai maksimum mencapai Rp1.103,98 miliar. Rata-rata belanja modal adalah sebesar Rp301,3130 miliar, dengan standar deviasi sebesar Rp172,80841

miliar. Rata-rata belanja modal yang jauh lebih rendah dari nilai maksimum menunjukkan bahwa mayoritas daerah mengalokasikan belanja modal dalam jumlah sedang atau kecil. Besarnya deviasi juga mencerminkan adanya disparitas dalam kapasitas pembiayaan infrastruktur dan aset tetap antar daerah.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah dalam persentase menunjukkan nilai minimum sebesar 2,19% dan nilai maksimum sebesar 6,33%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 5,1014%, dengan standar deviasi sebesar 0,78807%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi serta standar deviasi yang relatif kecil menandakan bahwa secara umum daerah memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tidak terdapat perbedaan mencolok antar wilayah. Ini mengindikasikan adanya kestabilan ekonomi secara regional selama periode pengamatan. Sebaran data yang terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan antar daerah relatif rendah dan tidak terdapat outlier yang signifikan.

5. Opini Audit

Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diukur dalam skala ordinal 1 hingga 5, menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata opini audit adalah 4,93, dengan standar deviasi sebesar 0,288. Nilai rata-rata yang sangat mendekati angka maksimum menunjukkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan daerah yang secara umum sangat baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,88 dan nilai maksimum sebesar 1,12, dengan rata-rata sebesar 1,0159 dan standar deviasi sebesar 0,03931. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara total belanja daerah dengan total pendapatan daerah, yang dinyatakan dalam persen (%). Rasio ini mencerminkan seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan yang tersedia untuk membiayai belanja, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah, karena belanja yang dilakukan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Nilai rasio efisiensi di atas 1 (atau 100%) menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang membelanjakan lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diperoleh, yang bisa berasal dari pemberian utang atau penggunaan sisa lebih pemberian anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, daerah dengan rasio efisiensi di bawah 1 menunjukkan penggunaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan pendapatan yang tersedia. Dengan demikian, hasil ini memberikan gambaran umum bahwa pemerintah daerah secara umum masih berada dalam batas efisiensi yang cukup stabil, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami defisit atau surplus anggaran dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu, rentang nilai efisiensi yang cukup sempit (hanya 0,24 poin dari minimum ke maksimum) serta standar deviasi yang rendah mengindikasikan bahwa kinerja keuangan antar daerah tidak menunjukkan penyimpangan yang mencolok.

4.3 ANALISIS DATA

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02615125
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.038
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Pengujian asumsi normalitas dilakukan terhadap residual tidak terstandarisasi menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan koreksi signifikansi Lilliefors. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,059 dengan nilai signifikansi asimtotik (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi ini lebih besar daripada taraf signifikan 0,05, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang

menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, residual pada model regresi dapat dianggap berdistribusi normal. Koreksi Lilliefors digunakan karena parameter distribusi normal (rata-rata dan simpangan baku) dihitung dari data sampel, bukan ditentukan sebelumnya, sehingga hasil uji menjadi lebih akurat. Selain itu, nilai signifikansi yang dilaporkan merupakan batas bawah dari nilai sebenarnya, namun hal ini tidak mempengaruhi kesimpulan uji karena tetap menunjukkan distribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas residual dan layak untuk digunakan.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	.265	3.767
	Dana Perimbangan (Rp)	.675	1.482
	Belanja Modal (Rp)	.221	4.529
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	.932	1.073

	Opini Audit dari BPK (1-5)	.945	1.059
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga seluruh variabel layak digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian kemandirian residual dilakukan dengan menggunakan *Runs Test* untuk mengevaluasi apakah urutan nilai residual bersifat acak atau membentuk pola tertentu. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa residual yang dihasilkan model regresi saling bebas dan tidak saling berkorelasi. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05, maka residual dapat dinyatakan acak dan asumsi kemandirian terpenuhi. Ringkasan hasil pengujian *Runs Test* dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00305
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	49
Z	-.882

Asymp. Sig. (2-tailed)	.378
a. Median	

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Pengujian kemandirian residual dilakukan menggunakan *Runs Test* untuk mengetahui apakah urutan nilai residual pada model regresi terjadi secara acak atau membentuk pola tertentu. Uji ini penting karena model regresi yang baik mengharuskan residual tidak saling berkorelasi (independen) dan acak. Berdasarkan hasil uji, median residual adalah sebesar -0,00305. Dari 105 data yang dianalisis, terdapat 52 data dengan nilai residual di bawah median, dan 53 data dengan nilai residual sama dengan atau di atas median. Jumlah *runs*, yaitu rangkaian pergantian nilai di atas dan di bawah median, sebanyak 49 kali. Nilai statistik Z untuk uji ini sebesar -0,882 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,378. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nol, yang menyatakan bahwa residual terjadi secara acak, tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa urutan residual pada model regresi bersifat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hal ini berarti asumsi kemandirian residual terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual pada model regresi bersifat konstan, dengan hasil uji disajikan pada tabel berikut. Uji ini penting dilakukan karena adanya heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations					
			Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Opini Audit dari BPK (1-5)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Correlation Coefficient	1.000	.539**	.524**	.023	.001	.045
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.815	.996	.651
		N	105	105	105	105	105	105
	Dana Perimbangan (Rp)	Correlation Coefficient	.539**	1.000	.559**	-.126	.021	-.046
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.200	.831	.639
		N	105	105	105	105	105	105
	Belanja Modal (Rp)	Correlation Coefficient	.524**	.559**	1.000	.024	.211*	.042
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.805	.031	.670
		N	105	105	105	105	105	105
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Correlation Coefficient	.023	-.126	.024	1.000	.088	.028
		Sig. (2-tailed)	.815	.200	.805	.	.371	.773
		N	105	105	105	105	105	105
	Opini Audit dari BPK (1-5)	Correlation Coefficient	.001	.021	.211*	.088	1.000	-.018
		Sig. (2-tailed)	.996	.831	.031	.371	.	.856
		N	105	105	105	105	105	105
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.045	-.046	.042	.028	-.018	1.000
		Sig. (2-tailed)	.651	.639	.670	.773	.856	.
		N	105	105	105	105	105	105

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan korelasi Spearman antara masing-masing variabel independen dengan residual tidak terstandarisasi (*unstandardized residual*). Tujuan dari uji ini adalah untuk mendeteksi apakah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Berdasarkan hasil uji yang disajikan dalam Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,651. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara PAD dan residual, yang berarti variabel ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Hal serupa juga ditunjukkan oleh variabel Dana Perimbangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,639, yang menunjukkan bahwa variabel ini juga bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,670 yang juga lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, Belanja Modal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan residual dan tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Demikian pula, variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,773, yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan dengan residual. Terakhir, variabel Opini Audit juga menunjukkan hasil yang sama dengan nilai signifikansi sebesar 0,856, yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berkontribusi terhadap munculnya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berdasarkan seluruh hasil uji korelasi Spearman tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan residual model. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas, sehingga layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

4.3.2 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun variabel independen yang dimasukkan dalam model ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit. Hasil pengolahan data ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta
	B	Std. Error		
1	(Constant)	1.052	.051	
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	-5.788E-14	.000	-.792
	Dana Perimbangan (Rp)	-2.953E-14	.000	-.399
	Belanja Modal (Rp)	1.633E-13	.000	.925
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	.00047	.00347	.01228
	Opini Audit dari BPK (1-5)	-.003	.009	-.028

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Model regresi linear berganda dibentuk berdasarkan nilai koefisien Unstandardized Coefficients (B), sehingga diperoleh persamaan model sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 1,052 - 5,788 \times 10^{-14}X_1 - 2,953 \times 10^{-14}X_2 \\ + 1,633 \times 10^{-13}X_3 + 0,00047 X_4 - 0,003 X_5$$

Keterangan

\hat{Y} : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X_2 : Dana Perimbangan (Rp)

X_3 : Belanja Modal (Rp)

X_4 : Pertumbuhan Ekonomi (%)

X_5 : Opini Audit BPK (skala 1–5)

Berdasarkan persamaan model di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- Konstanta (Constant) memiliki nilai sebesar 1,052 dengan standard error sebesar 0,051. Hal ini berarti apabila seluruh variabel independen dianggap konstan (bernilai nol), maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diprediksi sebesar 1,052.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -5,788E-14 dengan nilai beta -0,792. Artinya, PAD berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi PAD cenderung menaikkan rasio efisiensi yang merupakan ukuran kinerja

keuangan daerah dalam model ini. Pengaruhnya tergolong kuat, terlihat dari nilai beta yang mendekati -1.

- c. Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar -2,953E-14 dan beta -0,399, yang menunjukkan bahwa dana perimbangan juga berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi yang merupakan ukuran kinerja keuangan daerah dalam model ini kinerja keuangan dengan pengaruh yang bersifat sedang.
- d. Belanja Modal memiliki koefisien sebesar 1,633E-13 dan nilai beta sebesar 0,925 yang menunjukkan pengaruh positif sangat kuat. Hal ini berarti kenaikan belanja modal menaikkan nilai rasio efisiensi yang merupakan ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal secara signifikan membuat rasio efisiensi tinggi dan masuk ke dalam kriteria semakin tidak efisien.
- e. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai koefisien 0,00047 dengan beta 0,012 yang berarti bahwa variabel ini hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan secara praktis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun nilai positif menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin meningkatkan rasio efisiensi yang mana peningkatan rasio efisiensi merupakan indikator bahwa ketidakefisienan semakin tinggi.
- f. Opini Audit memiliki nilai koefisien -0,003 dan beta -0,028, yang juga menunjukkan pengaruh negatif sangat kecil terhadap rasio efisiensi. Artinya, perubahan opini audit BPK tidak memberikan dampak signifikan terhadap

peningkatan atau penurunan kinerja keuangan daerah. Namun peningkatan opini audit mempengaruhi Tingkat efisiensi menjadi semakin efisien.

4.3.3 Hasil Uji *Goodness of Fit Model*

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 mencerminkan proporsi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model yang dibangun. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 ^a	.243	.205	.026803

a. Predictors: (Constant), Opini Audit dari BPK (1-5), Pertumbuhan Ekonomi (%), Pendapatan Asli Daerah (Rp), Dana Perimbangan (Rp), Belanja Modal (Rp)

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,205 yang mengindikasikan bahwa sebesar 20,5% variasi dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit dan Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu sebesar 79,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nilai

Adjusted R Square sebesar 0,205 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dalam model, kemampuan prediksi model adalah sebesar 20,5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun model memiliki hubungan yang positif dan cukup berarti, namun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F sebagai bagian dari analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.023	5	.005	6.366	.000 ^b
	Residual	.071	99	.001		
	Total	.094	104			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Opini Audit dari BPK (1-5), Pertumbuhan Ekonomi (%), Pendapatan Asli Daerah (Rp), Dana Perimbangan (Rp), Belanja Modal (Rp)

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji menunjukkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) terhadap model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut, nilai F hitung sebesar 6,366 dengan nilai

signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai F tabel sebesar 2,31 atau lebih kecil dari F hitung sebesar 6,366. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, seluruh variabel independen dalam model yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, serta Opini Audit dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut karena memenuhi kriteria kelayakan model secara statistik.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana saja yang secara signifikan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Keputusan dalam uji t didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.) dan nilai t-hitung yang dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh

signifikan. Hasil pengujian uji t dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		B	t	Sig.	Keputusan
1	(Constant)	1.052	20.429	.000	
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	-5.788E-14	-4.670	.000	
	Dana Perimbangan (Rp)	-2.953E-14	-3.749	.000	
	Belanja Modal (Rp)	1.633E-13	4.972	.000	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	.000	.136	.892	
	Opini Audit dari BPK (1-5)	-.003	-.311	.757	
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian ini bertujuan untuk menilai signifikansi kontribusi setiap variabel bebas dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan membandingkan nilai absolut t hitung terhadap nilai t tabel serta melihat tingkat signifikansinya. Penjabaran hasil pengujian untuk masing-masing hipotesis disampaikan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -4,670 dan t tabel sebesar 1,98422. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai absolut t hitung lebih besar dari pada t tabel, serta nilai

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga **H₁** **diterima** dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meskipun arah pengaruhnya negatif. Namun demikian, dikarenakan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi maka semakin kecil nilai rasio efisiensi menandakan semakin baik dan semakin efisien.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -3,749 dan t tabel sebesar 1,98422. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai absolut t hitung lebih besar dari pada t tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga **H₂** **diterima** dan dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah meskipun arah pengaruhnya negatif. Namun demikian, dikarenakan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi maka semakin kecil nilai rasio efisiensi menandakan semakin baik dan efisien.

3. Hipotesis 3

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,972 dan t tabel sebesar 1,98422. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel, serta nilai signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga **H₃ diterima** dan dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, dikarenakan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi maka semakin tinggi nilai rasio efisiensi menandakan semakin buruk dan semakin tidak efisien.

4. Hipotesis 4

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,136 dan t tabel sebesar 1,98422. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,892 lebih besar dari 0,005 sehingga **H₄ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Hipotesis 5

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,311 dan t tabel sebesar 1,98422. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai absolut t hitung lebih kecil dari pada t tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,757 lebih besar dari 0,005 sehingga **H₅ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar -4,670. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai absolut t hitung lebih besar daripada nilai t table, maka hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio efisiensi. Temuan ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa peningkatan PAD secara relatif diikuti oleh penurunan nilai rasio efisiensi, yang berarti terjadinya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya fiskal.

Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara PAD dan efisiensi keuangan mencerminkan dinamika antara pihak prinsipal, yakni masyarakat sebagai pemilik otoritas fiskal, dan pihak agen, yaitu pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan anggaran. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah, maka semakin kuat tekanan akuntabilitas dan ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan praktik pengelolaan anggaran yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, demi menjaga legitimasi dan kepercayaan konstituennya dan mencapai pencapaian efisiensi keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah, yang mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada dana pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Atmoko & Khairudin (2022) serta Pradana & Handayani (2023) membuktikan bahwa peningkatan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Temuan serupa didukung oleh berbagai studi lainnya, seperti Putri & Yuniarta (2023), Digidewiseiso et al. (2022), Pastiwi & Aji (2020), dan Maulina et al. (2021). Berdasarkan akumulasi bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki kontribusi penting dalam mendorong efisiensi keuangan daerah.

4.4.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Dana Perimbangan juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 dan t hitung -3,749. Sama seperti PAD, hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan bersifat negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana perimbangan cenderung diikuti oleh penurunan rasio efisiensi, yang berarti terjadi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks teori keagenan, hubungan ini mencerminkan pergeseran tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Ketika dana perimbangan yang

diterima semakin besar, ekspektasi terhadap akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah pun semakin tinggi. Tekanan tersebut mendorong agen untuk mengelola belanja secara lebih efisien guna memenuhi kewajiban kinerja dan mempertahankan kepercayaan institusional. Oleh karena itu, hasil ini memperkuat argumen bahwa transfer fiskal dari pusat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam membentuk perilaku agen yang efisien dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dana perimbangan merupakan instrumen fiskal yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pendanaan antar daerah. Ketika belanja daerah melampaui pendapatan asli, dana perimbangan berfungsi sebagai solusi untuk menutupi defisit dan meningkatkan total pendapatan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Noeng et al. (2023), Insani et al. (2023), serta Andjarwati et al. (2021), menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki dampak yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, dampak tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan risiko ketergantungan fiskal yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menemukan titik keseimbangan antara pemanfaatan dana perimbangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mencapai efisiensi dan keberlanjutan keuangan daerah. Dengan demikian, strategi penguatan kapasitas fiskal daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pemanfaatan dana transfer, tetapi juga pada inovasi kebijakan yang mendorong eksplorasi dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.

4.4.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Belanja Modal menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bersifat positif, dengan nilai signifikansi 0,000 dan t hitung 4,972. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah, semakin tinggi pula nilai rasio efisiensi. Dengan kata lain temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal berasosiasi dengan peningkatan rasio efisiensi, yang secara metodologis berarti penurunan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengukuran efisiensi, rasio yang lebih tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah mengeluarkan anggaran relatif lebih besar terhadap output yang dihasilkan, sehingga tidak mencerminkan efektivitas dalam penggunaan belanja modal. Menurut teori keagenan, relasi ini dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal, yaitu masyarakat yang mengharapkan pemanfaatan dana publik yang optimal, dan agen, yakni pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ketika belanja modal tidak diiringi oleh mekanisme evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berbasis hasil, maka terdapat potensi munculnya perilaku oportunistik yang mengarah pada alokasi dana tidak produktif.

Belanja modal merupakan bentuk pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, hasil regresi menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi, yang justru menandakan penurunan

efisiensi keuangan. Berdasarkan teori keagenan, fenomena ini dapat disebabkan oleh alokasi investasi yang tidak optimal, di mana agen tidak sepenuhnya merespons kepentingan prinsipal dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, belanja modal perlu dirancang secara strategis, dievaluasi secara transparan, dan diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar benar-benar berkontribusi pada efisiensi kinerja keuangan.

4.4.4 Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Pertumbuhan Ekonomi, yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,892 dan t hitung 0,136. Variabel ini memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik antara tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil serupa bahwa pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah juga diungkapkan oleh Aziz & Kusumawati (2024) dan Insani et al. (2023).

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan dorongan positif terhadap kinerja pemerintah, termasuk dalam optimalisasi belanja dan peningkatan efisiensi anggaran. Namun, dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu bersifat langsung. Ketidakberpengaruhannya dapat dijelaskan melalui sudut pandang teori keagenan (agency theory), yang menekankan adanya relasi antara prinsipal (rakyat dan otoritas pengawas) dan agen (pemerintah daerah) dalam pelaksanaan fungsi keuangan publik. Ketika sistem insentif dan mekanisme kontrol

terhadap agen tidak cukup kuat, informasi eksternal seperti angka pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengubah perilaku pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen mungkin tidak merespons peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan keuangan yang lebih efisien jika tidak didorong oleh insentif yang terstruktur atau tekanan dari mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Implikasinya, untuk meningkatkan efisiensi kinerja keuangan, keberadaan pertumbuhan ekonomi perlu dipadukan dengan penguatan tata kelola internal, seperti sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (output-based performance), transparansi anggaran, dan partisipasi publik. Hanya dengan demikian, kondisi ekonomi makro dapat menjadi instrumen penggerak yang lebih efektif dalam mendorong efisiensi birokrasi fiskal di tingkat daerah.

4.4.5 Opini Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Opini Audit yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,757 dan t hitung -0,311, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam model ini, Dengan demikian, perubahan pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi capaian kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini. Penelitian oleh Dwi Sundari & Pramesti (2025) juga menyatakan bahwa opini audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun merepresentasikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum, belum tentu berkorelasi langsung dengan efisiensi penggunaan anggaran dalam konteks kinerja fiskal operasional. Dalam kerangka teori keagenan, ketidakhadiran pengaruh tersebut dapat dipahami sebagai lemahnya daya tekan simbolik dari opini audit terhadap perilaku agen, yaitu pemerintah daerah, dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Opini audit cenderung bersifat normatif dan evaluatif atas kepatuhan terhadap standar pelaporan, namun tidak selalu mampu mendorong perubahan substansial dalam praktik penganggaran atau efisiensi alokasi sumber daya. Oleh sebab itu, efektivitas opini audit sebagai instrumen kontrol eksternal terhadap agen memerlukan dukungan sistem akuntabilitas yang lebih operasional, seperti evaluasi berbasis kinerja dan partisipasi publik. Dengan demikian, peran opini audit dalam mendorong efisiensi keuangan pemerintah daerah harus dilihat secara lebih kontekstual dan tidak hanya bergantung pada hasil penilaian formal semata.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 diterima. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memberikan pengaruh yang baik terhadap nilai efisiensi sedangkan Belanja modal menunjukkan dampak sebaliknya terhadap nilai efisiensi yang merupakan ukuran dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis 4 dan hipotesis 5 ditolak. Hal ini dikarenakan hubungan tersebut tidak bersifat secara langsung. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja keuangan, keberadaan pertumbuhan ekonomi perlu dipadukan dengan unsur lain, sehingga kondisi ekonomi makro dapat menjadi instrumen penggerak yang lebih efektif dalam mendorong efisiensi. Sedangkan Opini audit cenderung bersifat normatif dan evaluatif atas kepatuhan terhadap standar pelaporan, namun tidak selalu mampu mendorong perubahan substansial dalam praktik penganggaran atau efisiensi alokasi sumber daya.

5.2 IMPLIKASI

Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan para pengambil kebijakan fiskal. Efisiensi keuangan harus didukung oleh strategi perencanaan dan evaluasi berbasis hasil yang akuntabel. Penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD menjadi prioritas yang perlu dikembangkan, misalnya dengan memperluas basis pajak daerah, meningkatkan kapasitas manajemen pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Selain itu, opini audit yang bersifat simbolik perlu diiringi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal yang mampu menekan risiko perilaku oportunistik agen. Dengan mengintegrasikan dorongan ekonomi daerah dan penguatan tata kelola keuangan publik, pemerintah dapat membentuk sistem fiskal yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pengukuran efisiensi dilakukan secara kuantitatif melalui rasio belanja terhadap pendapatan, tanpa mempertimbangkan kualitas output pelayanan publik yang dihasilkan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data mikro seperti rincian program belanja dan laporan kinerja perangkat daerah menjadi kendala dalam memperluas analisis lebih lanjut.
2. Model regresi yang digunakan hanya menjelaskan sebagian kecil variabilitas rasio efisiensi, sehingga terdapat pengaruh dari variabel

eksternal lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,205 mengindikasikan sebesar 79,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Berdasarkan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka agenda penelitian mendatang dapat diarahkan pada sejumlah penguatan metodologis dan perluasan lingkup analisis yang lebih komprehensif. Adapun rancangan pengembangan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mendatang disarankan untuk menggabungkan indikator berbasis kualitas pelayanan publik ke dalam pengukuran efisiensi, seperti tingkat kepuasan pengguna layanan, ketercapaian target program, dan relevansi output terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran efisiensi yang lebih substansial dan tidak hanya bersifat angka semata.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan model regresi yang mencakup variabel tambahan seperti tata kelola fiskal, transparansi anggaran, dan partisipasi publik. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masih rendahnya nilai *Adjusted R Square* dalam model saat ini. Di samping itu, penggunaan data mikro dari perangkat daerah, termasuk rincian belanja per program dan capaian kinerja, dinilai penting untuk meningkatkan akurasi dan validitas hasil analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., Sari, I. M., & N., Y. A. (2022). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 7(1). <https://doi.org/10.33772/jak-aho.v7i1.24546>

Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5.

Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). ANALYSIS OF LOCAL OWN REVENUE AND BALANCING FUNDS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICTS AND CITIES IN THE REGION OF EAST JAVA PROVINCE. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>

Anggraeni, A. (2016). *PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)*.

Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>

Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 4(3).

Aryasandi, F. I., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10), 7030–7043. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3752>

Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10. <https://doi.org/10.37641/jakes.v10i1.1295>

Az Zahrah, F., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>

Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6984–6995. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Bahrul Ilmi, M. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, SIZE DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2).

Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).

Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4.

Dwi Sundari, A., & Pramesti, W. (2025). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.

Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Julitawati, E., & Darwanis, J. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akutansi*.

Kopong, L. S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 7, 31–44.

Lathifa Hasna, H. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>

Ningrum, N. W. C., Silviana, P., & Rahmatika, D. N. (2024). Systematic Literatur Review : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital (APKE)*, 1(3). <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3>

Noeng, A. Y., Kolit, Y. A. D. D., & Rato, E. Y. Da. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020). *Jurnal Accounting UNIPA*, 2.

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *JRAK*, 9(2). www.djpk.depkeu.go.id

Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>

Pastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28, 89–105.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JIAKu*

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2, 192–209.
<https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2>

Putri, A. S. N. P., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*, 14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>

Rachmawati, T., & Handayani, N. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN SILPA DALAM PENGARUHNYA KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 17(1). www.djpk.kemenkeu.go.id

Retnowati, R. (2016). *ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, BELANJA DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. www.djpk.kemenkeu.go.id

Safitri, D., Purnomo, D. E., & Fitrayudi, M. (2024). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY SAAT COVID 19. *Jurnal Neraca*, 20(1).

Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tampubolon, E. G. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio E-Kons*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i1.3051>

Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39–49. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1704>

Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.

Yasin, M. (2020). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2).

